Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)
Vol.02, No.02 Desember 2023, pp. 181~190
ISSN: ****-**** | E-ISSN: ****-**** |https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS

ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINA DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG

Nuramalia Putri, Mhd. Rafi*
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info

Keywords:

Family Hope Program,
Poverty
Effectiveness

ABSTRACT

This research aims to conduct an analysis of the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in overcoming the problem of poverty in Pantai Cermin Village, Tapung District, Kampar Regency. The research method used is a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative approach involves a survey of a number of PKH beneficiary families to measure the program's impact on economic, health and educational aspects. Meanwhile, the qualitative approach involves in-depth interviews with various related parties, such as PKH participants, field officers and local community leaders, to understand their perceptions of this program. The research results show that PKH has had a significant impact in increasing poor families' access to health and education services. This program has also succeeded in increasing the income of beneficiary families, although there are still challenges in terms of productive use of aid funds for independent businesses. However, there are several obstacles to implementation, such as limited information regarding the program, low understanding of how to utilize assistance effectively, and administrative problems.

Info Artikel

Kata Kunci:

Program Keluarga Harapan
Kemiskinan
Efektivitas

SARI PATI

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif melibatkan survei terhadap sejumlah keluarga penerima manfaat PKH untuk mengukur dampak program terhadap aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti peserta PKH, petugas lapangan, dan tokoh masyarakat setempat, guna memahami persepsi mereka terhadap program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Program ini juga berhasil meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat, meskipun masih ada tantangan dalam hal pemanfaatan dana bantuan secara produktif untuk usaha mandiri. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan informasi terkait program, pemahaman yang rendah tentang cara memanfaatkan bantuan secara efektif, dan masalah administrasi.

PENDAHULUAN

Kemiskinanan adalah salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya suatu kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari hadirnya persoalan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan adalah masalah sosial yang selalu ada dan paling melekat dengankehidupan sosial, bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial hingga sekarang kemiskinan mempengaruhi masalah sosial lainnya begitu pula sebaliknya berbagai cara telah dilakukan untuk mengataasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangat besar setiap tahunnya. Menteri keuangan pada januari tahun 2019 menjelaskan adanya peningkatan jumlah besaran anggaran belanja pemerintah untuk pelindungan sosial. Pada tahun 2014 berjumlah 120.03 triliun, tahun2015 berjumlah 140 triliun, tahun 2016 berjumlah 1137.7 triliun, tahun 2017 berjumlah 148.9, tahun 2019 berjumlah 200.8 triliun.

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami hampir semua orang di dunia, faktanya masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara yang berkembang saja tapi juga di negara majupun mengalami masalah kemiskinan, meski jumlahnya tidak besar. Bagi negara berkembang seperti Indonesia masalah kemiskinan menjadi momok yang masih sulit untuk diatasi. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai berbagai hal seperti rendahnya mutu hidup penduduk, terbatasnya mutu pangan, rendahnya mutu layanan kesehatan dan pendidikan. Penyebab terjadinya kemiskinan juga bermacam ada yang karena faktor alamiah seperti cacat fisik dan faktor usia (lansia) yang mengakibatkan mereka terbatas bahkan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, faktor budaya seperti budaya malas, memerima keadaan pasrah dan lain-lain, faktor kebijakan seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM biasanya akan terjadi peningkatan jumlah orang miskin.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus memerhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat terutama kemiskinan yang selalu ada dalam masyarakat, karena kemiskinan merupakan hal yang tidak penah lepas dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin anak berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang mereka peroleh, sehingga dapat mengurangi produktivitas. Kondisi ini akan menyebabkan peningkatan beban ketergantungan bagi masyarakat baik dari segi pekerjaan maupun kesehatan, penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran). Sampai saat ini pemerintah telah membuat berbagai kebijakan seperti program Raskin, BLT, PNPM Mandiri dan program-program lainnya untuk mensejahterakan masyarakat-masyarakat miskin di Indonesia

Bahkan upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini juga didukung dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan seperti, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta aturan lain yang mendukung upaya tersebut. Maka dengan demikian dengan adanya program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah

program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), apabila mereka yang memenuhi persyaratan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran yang ditanggung keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan sebesar 9,78% pada Maret 2020, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang. Angka kemiskinan ini juga akan berkembang terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut maka Program Keluarga Harapan (PKH) dijadikan sebagai jaringan pengamanan sosial dengan memperluas cakupan penerima dan peningkatan indeks manfaat. Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulan kemiskinan maka pemerintah mengeluarkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang pemerintah untuk membantu masyarakat miskin berupa bantuan bersyarat.

Bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan Pogram Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki anak-anak yang masih sekolah, maka itu sangat membantu mereka untuk membiayai anak mereka untuk terus bersekolah, dan karena pendidikan sangat penting dalam mendukukung pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dikatakan dapat mempengaruhi pendapatan seseorang dimasa yang akan datang dan dipercaya menjadi kunci dari suatu pembangunan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.

Maka dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintah supaya terciptanya kesejahteraan masyarakat dan mengatasi angka kemiskinan yang berkepanjangan. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mendorong anak-anak supaya tetap terus bersekolah, karena Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan merupakan tujuan Program PKH, yang mana program ini khusus di luncurkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Desa Pantai Cermin salah satu bagian dari kecamatan Tapung kabupaten Kampar, yang memiliki jumlah penduduk desanya 8.778 orang, sampai saat ini jumlah masyarakat yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 90 KK. Bantuan ini sudah diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan PKH, masyarakat desa tersebut yang masyarakatnya tergolong miskin sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) mayarakat akan mendapatkan bantuan melalui empat tahap, dalam satu tahun, bagi masyarakat yang terdaftar dalam program tersebut akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, mayoritas sumber pendapatnnya berupa kelapa sawit yang akan dipanen 2 kali dalam sebulan. Namun tidak semua penduduknya memiliki lahan kelapa sawit beberapa dari mereka sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Desa Pantai Cermin masyarakatnya yang mana pendapatan mereka bergantung pada kelapa sawit, dan bekerja di PT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak semua dari

mereka mempunyai lahan sawit dan pertanian dan juga tidak semua diantara mereka berkerja di PT, masih banyak masyarakat yang mata pencahariannya dengan mencari ikan disungai dan ikan tersebut dijual pada masyarakat, dengan melihat dan melakukan observasi secara lansung, dapat disimpulkan dengan mengharapkan pendapatan dari hasil penjualan ikan tersebut sangat tidak cukup untuk menghidupi satu keluarga, karena semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak kebutuhan yang diperlukan, selanjutnya masyarakat disana juga bekerja dengan perkerjaan upah harian dan itupun sama halnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Inilah yang mengakibatkan kemiskinan selalu terjadi diakibatkan oleh sumber pendapatan yang tidak memadai. Dengan adanya program pemerintah yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu kehidupan masyarakat miskin di desa pantai cermin, dan dapat menunjang kehidupan dari segi kesehatan, pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	4531
2	Perempuan	4247
	Jumlah	**8778 Jiwa**

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di desa pantai cermin lebih banyak laki-laki dari pada jumlah penduduk perempuan, dan dapat dilihat jumlah keseluruan penduduk berjumlah: 8.778 Jiwa

Tabel 2
Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Desa	Jumlah KTSM/KSM		
		2020	2021	2022
1	Petapahan	317 KK	297 KK	282 KK
2	Pantai Cermin	431 KK	411 KK	396 KK
3	Petapahan Jaya	100 KK	80 KK	66 KK
4	Sumber Makmur	140 KK	117 KK	102 KK
5	Indra sakti	123 KK	104 KK	89 KK
6	Tri manunggal	262 KK	242 KK	227 KK
7	Mukti sari	160 KK	138 KK	123 KK
8	Gading sari	133 KK	113 KK	98 KK
9	Air terbit	92 KK	82 KK	69 KK
10	Pancuran gading	80 KK	68 KK	57 KK
11	Sari galuh	130 KK	106 KK	93 KK
12	Sungai putih	95 KK	74 KK	58 KK
13	Palambaian	50 KK	34 KK	20 KK
14	Tanjung sawit	180 KK	163 KK	148 KK
15	Pagaruyung	81 KK	62 KK	48 KK
16	Indrapuri	187 KK	167 KK	152 KK
17	Kenantan	130 KK	105 KK	94 KK
18	Sibuak	162 KK	137 KK	122 KK
19	Muara mahat baru	134 KK	109 KK	95 KK
20	Sei lambu makmur	107 KK	86 KK	72 KK

21	Sungai agung	139 KK	119 KK	104 KK
22	Karya indah	155 KK	132 KK	117 KK
23	Kijang rejo	178 KK	152 KK	134 KK
24	Bencah kelubi	96 KK	78 KK	63 KK
25	Batu gajah	82 KK	68 KK	53 KK
Jumlah		**3744 KK**	**3244 KK**	**2882 KK**

Sumber: Kantor Camat Tapung

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin di kecamatan Tapung Kabupaten Kampar di tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan.

Tabel 3
Jumlah Penerima Program PKH, dan Jumlah Kepala Keluarga Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	**Desa Pantai Cermin**	**Jumlah**
1	Penerima PKH	90 KK
2	Kepala Keluarga	2.114 KK

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 90 KK dan jumlah Kepala Keluarga di Desa Pantai Cermin sebanyak 2.114 KK pada tahun 2022. Maka berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti ingin mengkaji "Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar".

METODE

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkait dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkait dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, Times New Roman -12 unbold, rata kiri.

Khususnya untuk penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara jelas (untuk penelitian kuantitatif, juga perlu). Target/subjek penelitian (untuk penelitian kualitatif) atau populasi-sampel (untuk penelitian kuantitatif) perlu diurai dengan jelas dalam bagian ini. Perlu juga dituliskan teknik memperoleh subjek (penelitian kualitatif) dan atau teknik samplingnya (penelitian kuantitatif). Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini.

Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (experimental design) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini. Macam data, bagaimana data dikumpulkan, dengan instrumen yang mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengumpulannya, perlu diuraikan secara jelas dalam bagian ini. Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dangan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana terarah, berkelanjutan maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progran Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai tujuan utama yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
c. Mengurangi perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program Keluarga Haparan dirancang oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin belum bisa mengatasi masalah kemiskinan di desa pantai cermin, karena yang menerima program PKH tidak tepat sasaran, di tambah dengan adanya sikap nepotisme yang terjadi dan masih banyak keluarga yang sangat rentan yang tidak mendapatkan program PKH tersebut, program ini perlu seleksi yang sangat tepat seperti 1 tahun sekali pusat harus melakukan pemantauan lansung turun ke desa melihat keadaan keluarga yang mendapatkan program apakah tepat atau tidaknya program itu tersalur.

Komponen pendidikan

Dengan pentingnya pendidikan tersebut, pemerintah membuat program belajar wajib 12 tahun belajar, dengan adanya program wajib belajar tersebut pemerintah memberikan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin, bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan seperti pelengkapan belajar, seragam sekolah, dan buku penunjang pembelajaran lainnya.

Bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah mewajibkan masyarakat miskin menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi /Universitas. Harapan pemerintah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut anak yang memiliki pendidikan tinggi dapat memutuskan rantai kemiskinan.

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin dalam Komponen Pendidikan belum terpenuhi masih banyak penerima yang tidak merasa cukup oleh dana yang diberikan dalam pencairan yang 3 bulan sekali, dan masyarakat memandang bahwa dana yang diberikan tidak digunakan dengan baik, dan tidak dipakai untuk keperluan pendidikan anak, masih banyak anak-anak penerima program yang memakai baju yang sudah pendek kusam/ kuning dan celana yang sudah kependekan. Jadi antara tidak di utamakan untuk kepentinagan pendidkan atau dana yang di terima tidak mencukupi.

Komponen Kesehatan

Aspek Kesehatan sangat penting dalam kehidupan seseorang agar terjaminnya kesehatan seseorang secara jasmani dan rohani, aspek ini perlu dijalankan dan menjadi salah satu fokus Program Keluarga Harapan, dengan menyediakan sarana dan prasarana tenaga kesehaan yang memadai, tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan dari aspek kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH):

a. Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

b. Mendukung upaya peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak, dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pelayanan kesehatan.

Kesehatan menentukan kesejahteraan seseorang dengan dilihatnya sehat atau tidaknya seseorang. Dengan ada Program Keluarga Harapan (PKH) ini pemerintah mengharapkan bahwa semua keluarga yang mendapatkan manfaat dapat menerima pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di desa seperti posyandu memeriksa anak, ibu hamil dan lansia. Ini adalah tujuan dari program agar terpenuhinya kesehatan bagi keluarga yang menerima manfaat, dengan setiap bulannya wajib memeriksakan kesehatan pada pelayanan kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam komponen Kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik untuk memastikan kesehatan untuk keluarga penerima manfaat. Dan dengan adanya peraturan yang mewajibkan keluarga penerima manfaat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada pelayanan kesehatan da nada laporan untuk pusat, dengan itu terjaminnya kesehatan anak dengan melakukan imunisasi lengkap, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan memerikan vitamin A, susu, roti, dan bubur kacang hijau. Terjaminnya kesehatan ibu hamil dan janin dengan melakukan pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran fundus dan detak jantung janin. Bagi untuk lansia akan terjamin kesejahteraannya dan terjagan kesehatannya dengan melakukan posyandu setiap bulannya dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, cek kadar gulah darah dan kolestrol dan melakukan olah raga senam gerak jalan.

Komponen Kesejahteraan Sosial

Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan suatu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk layanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Aspek Kesejahteraan sosial, yaitu:

a. Lanjut Usia (Lansia) 70 tahun keatas, maksimal 1 orang dalam keluarga
b. Penyandang Disabilitas Berat (Tuna Daksa dan Keterbelakangan Mental), maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

Dengan terpenuhinya kesejahteraan mereka yang rentan maka program keluraga harapan mengategorikan mereka yang lanjut usia 70 tahun keatas berhak mendapatkan manfaat dan terjaminnya keadaan sosial. Penyandang Disabilitas Berat keterbelakangan mental, pemerintah berharap dengan adanya program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan agar mereka yang rentan akan keadaanya terpenuhi kebutuhan sosialnya.

Dapat disimpulkan bahwa Komponen kesejahteraan sosial dalam program keluarga harapan (PKH) di desa pantai cermin sudah terpenuhi dan bagi lansia yang rentan akan kemiskinan sudah mendapatkan bantuan PKH dengan ini pemerintah berharap PKH dapat meringan kan mereka yang memiliki keadaan yang rentan pada kemiskinan dan mereka yang sudah tidak bisa lagi bekerja masih dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan adanya bantuan sosial yang bernama program keluarga harapan (PKH).

Tabel 4
Skema Bantuan Normal

no	Kategori	Index/ 3 Bulan /(Tahap) Pencairan	Index/ Per Tahun
1	Ibu Hamil	Rp. 750.000 x 4 Tahap	3.000.000
2	Anak Umur 0-6 tahun	Rp. 750.000 x 4 Tahap	3.000.000
3	Anak SD	Rp. 225.000 x 4 Tahap	900.000
4	Anak SMP	Rp. 375.000 x 4 Tahap	1.500.000
5	Anak SMA	Rp. 500.000 x 4 Tahap	2.000.000
6	Disabilitas Berat	Rp. 600.000 x 4 Tahap	2.400.000
7	Lanjut Usia 70 +	Rp. 600.000 x 4 Tahap	2.400.000

Sumber: Pendamping PKH

Tabel 5
Skema Bantuan Tahun 2023

No	Kategori	Skema Penyaluran Tahun 2023				Penyaluran Tahun 2023
		Tahap 1-2	Juli-agust	Sep-okt	Nov-Des	
1	Ibu Hamil	1.500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
2	Anak usia 0-6 Thn	1.500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
3	Anak SD	450.000	150.000	150.000	150.000	900.000
4	Anak SMP	750.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
5	Anak SMA	1.000.000	333.333	333.333	333.333	2.000.000
6	Disabilitas Berat	1.200.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
7	Lanjut Usia 70+	1.200.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000

Sumber: Pendamping PKH

Faktor-Faktor Penghambat Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Fakto-faktor Penghambat Program keluarga harapan (PKH) di Desa Pantai Cermin dalam mengatasi masalah kemiskinan sebagai berikut:

1. Adanya sikap Nepotisme

Nepotisme dalam Undang-undang adalah setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hokum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kloninya diatas kepentingan masyarakat, Negara dan bangsa.

Dan dalam pengertian lain, nepotisme dalam Islam adalah menganjurkan untuk mendahulukan pemberian atau mementingkan sanak saudara atau teman sendiri, terutama dalam hal sedekah, infak dan zakat yang betul-betul membutuhkan dan mendesak.

2. Ketidak Tepatan Sasaran dari program keluarga harapan

Ketidak tetapan sasaran dari program harapan selalu menghantui, bagi keluarga yang sudah layak dan bisa di bilang sejahtera hidup mereka mereka mempunyai mobil dan kebun kelapa sawit yang luas dan mempunyai pendapatan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka bisa saja mereka yang mendapatkan bantuan sosial, sedangkan keluarga yang sangat rentan yang pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka semestinya yang patut dan layak menerima bantuan sosial tersebut terkadang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

3. Seleksi yang kurang tepat

Seleksi sangat penting dilakukan dimana saja dari dunia pekerjaan, maupun pengorganisasian agar menjamin dan tepat untuk suatu pekerjaan maupun jabatan. Apabila

seleksi yang dilakukan oleh organiasi tidak tepat maka suatu program tidak mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Dan melakukan seleksi tersebut orang yang professional tidak mempunyai sifat nepotisme dan adanya keadilan, banyak seleksi yang tidak tepat biasanya diakibatkan dari atasannya yang memberi wewenang bawahannya untuk melakukan seleksi dan terkadang orang yang diberi wewenang untuk melakukan seleksi kadang menyalahgunakan wewenang tersebut dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi organisasi maupun kebijakan.

bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki faktor-faktor penghambat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan masih banyaknya sifat nepotisme yang mementingkan kepentingan keluarga, sasaran program yang tidak tepat, orang yang sudah layak kehidupannya mendapatkan bantuan sedangkan mereka yang rentan tidak mendapatkan bantuan, seleksi yang kurang tepat dilakukan seleksi tidak dari pusat lansung melainkan ketua PKH desa dan tidak menjadi seleksi tidak tepat dengan mereka masih mementingkan kepentingan keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin belum bisa mengatasi masalah kemiskinan di desa pantai cermin, karena yang menerima program PKH tidak tepat sasaran, masih banyak keluarga yang tidak layak mendapatkan bantuan, di tambah dengan adanya sikap nepotisme yang terjadi yang mementikan kepentingan keluarga dan masih banyak keluarga yang sangat rentan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup tidak mendapatkan program PKH tersebut.
2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin dalam Komponen Pendidikan belum terpenuhi masih banyak penerima yang tidak merasa cukup oleh dana yang diberikan dalam pencairan yang 3 bulan sekali, dan masyarakat memandang bahwa dana yang diberikan tidak digunakan dengan baik, dan tidak dipakai untuk keperluan pendidikan anak, masih banyak anak-anak penerima program yang memakai baju yang sudah pendek kusam/ kuning dan celana yang sudah kependekan. Jadi antara tidak di utamakan untuk kepentinagan pendidkan atau dana yang di terima tidak mencukupi.
3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen Kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik untuk memastikan kesehatan untuk keluarga penerima manfaat. Dan dengan adanya peraturan yang mewajibkan keluarga penerima manfaat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada pelayanan kesehatan dan adanya laporan untuk pusat, dengan itu terjaminnya kesehatan anak dengan melakukan imunisasi lengkap, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan memerikan vitamin A, susu, roti, dan bubur kacang hijau. Terjaminnya kesehatan ibu hamil dan janin dengan melakukan pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan atas, melakukan imunisasi TT, pengukuran fundus dan detak jantung janin. Bagi untuk lansia akan terjamin kesejahteraannya dan terjaganya kesehatannya dengan melakukan posyandu setiap bulannya dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, cek kadar gulah darah dan kolestrol dan melakukan olah raga senam gerak jalan.
4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen Kesejahteraan Sosial dalam program keluarga harapan (PKH) di desa pantai cermin sudah terpenuhi dan bagi lansia yang rentan akan kemiskinan sudah mendapatkan

bantuan PKH dengan ini pemerintah berharap PKH dapat meringankan mereka yang memiliki keadaan yang rentan pada kemiskinan dan mereka yang sudah tidak bisa lagi bekerja berat masih dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan adanya bantuan sosial yang bernama program keluarga harapan (PKH).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan di desa pantai cermin dengan masih banyaknya sifat nepotisme yang terjadi dengan mementingkan kepentingan keluarga, sasaran program yang tidak tepat, orang yang sudah layak kehidupannya punya pendapatan banyak dengan kebun kelapa sawit yang luas mendapatkan bantuan sedangkan mereka yang rentan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup tidak mendapatkan bantuan PKH, seleksi yang kurang tepat dilakukan, yang seleksinya tidak dari pusat lansung melainkan ketua PKH desa tersendiri dan itu mengakibatkan seleksi tidak tepat dengan mereka masih yang menjadi ketua PKH di desa tersebut melakukan nepotisme, yang mementingkan keperluan/ kepentingan keluarga terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Antoro, Hajar Hari. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dedi Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. (2014). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)*. JAP, Vol. 2, No.1, Hal. 29-34.

Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 3 10.

Harianto, Sugeng. 2016. *Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*.Universitas Negeri Surabaya.

Https://Kemensos.Go.Id/Program-Keluarga-Harapan-PKH (Diakses:18 Juli 2021)

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana,2011).

Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Http://Pkh-Jogjaistimewa.Com

M. Djunaidi Ghony ddk. 2016 *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Ar- Ruzz, Media,2016

Moelong. 2000. *Metode penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya: Bandung

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan

R. Harry Hikmat. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta, Maret 2016, Rektort Jendral Perlindungan Sosial

S. Alsukri, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kota Pekanbaru," J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hummanioramaniora, vol. 4, no. 1, p. 26, 2020.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2020. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi di lengkapi dengan Metode R dan D.* Bandung: cv Alfabeta

Sosial, Kementrian. 2014. *Pedoman Umum PKH*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.